

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA-013.05.2.408894/2023**

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
 3. Provinsi : (21) MALUKU
 4. Kode>Nama Satker : (408894) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON
- Sebesar :Rp. 804.801.000,00 (DELAPAN RATUS EMPAT JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- | | Jumlah Uang |
|--|--------------------|
| 013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 804.801.000,00 |
| 013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah | Rp. 804.801.000,00 |

C. Sumber Dana Berasal Dari:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. 804.801.000,00 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. 0,00 |
| 2. PNBP | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. 0,00 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. 0,00 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. 0,00 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. 0,00 | 5. Hibah Langsung | Rp. 0,00 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. 0,00 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. 0,00 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. 0,00 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. 0,00 |
| | | 6. SBSN PBS | Rp. 0,00 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Ambon (061) Rp. 804.801.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.05.2.408894/2023
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (21) MALUKU
Kode / Nama Satker : (408894) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman IA.1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	804.801.000,00
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	804.801.000,00
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 2. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 3. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 4. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 7. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 11. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 12. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 13. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 14. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 15. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 16. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 19. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 20. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 21. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	
	: 23. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	
	: 24. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	
	: 25. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	
	: 26. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
	: 27. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	
	: 28. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
	: 29. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	
	: 30. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
	: 31. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	
	: 32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.05.2.408894/2023
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (21) MALUKU
Kode / Nama Satker : (408894) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman IA.2

Klasifikasi Rincian Output	1	: 5252.AEA	Koordinasi	10.00	kegiatan	407.072.000,00
Rincian Ouput		: 01	AEA.001 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10.00	kegiatan	407,072,000.00
Klasifikasi Rincian Output	2	: 5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	72.00	orang	185.822.000,00
Rincian Ouput		: 01	AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	72.00	orang	185,822,000.00
Klasifikasi Rincian Output	3	: 5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12.00	operasi, Hari Operasi	211.907.000,00
Rincian Ouput		: 01	BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	211,907,000.00

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.05.2.408894/2023
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga: (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (21) MALUKU
Kode>Nama Satker : (408894) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman IB.1

				Pagu		Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	804.801.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	804.801.000,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBP	Rp.	0,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.05.2.408894/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
Provinsi : (21) MALUKU
Kode / Nama Satker : (408894) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON
Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
408894	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	-	804.801,00	-	-	-	804.801,00		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	804.801,00	-	-	-	804.801,00		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	804.801,00	-	-	-	804.801,00		
5252.AEA	Koordinasi	-	407.072,00	-	-	-	407.072,00	21.51	
01	RM	-	407.072,00	-	-	-	407.072,00	061	RM
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	-	185.822,00	-	-	-	185.822,00	21.51	
01	RM	-	185.822,00	-	-	-	185.822,00	061	RM
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	-	211.907,00	-	-	-	211.907,00	21.51	
01	RM	-	211.907,00	-	-	-	211.907,00	061	RM
JUMLAH		-	804.801,00	-	-	-	804.801,00		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.05.2.408894/2023
IV A. B L O K I R

Kementerian Negara / Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode / Nama Satker : [408894] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.05.2.408894/2023
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode / Nama Satker : [408894] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332